



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 15 Nopember 2016 No. 91

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : SITI KHALIMAH, S.H.
- 2. Jabatan : SEKRETARIS - PENGADILAN AGAMA SALATIGA
- 3. Tempat & Tanggal Lahir : PURWOREJO, 3 Januari 1965
- 4. Alamat Kantor : Jl. LINGKAR SELATAN ARGOMULYO, SALATIGA
- 5. Tanggal Pelaporan : 3 Februari 2016

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. 143.484.000

(TANAH DAN BANGUNAN)

- 1. Tanah & Bangunan seluas 118 m2 & 50 m2, di Kota SEMARANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2016 NJOP Rp.143.484.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI DAN Rp. 8.000.000

MESIN LAINNYA

- 1. Motor, merk YAMAHA, tahun pembuatan 2010, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2010 nilai jual Rp.8.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, Rp. 0

**PERKEBUNAN, PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA**

234486

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| c. HARTA BERGERAK | Rp. | 0 |
| LAINNYA | | |
| C. SURAT BERTAGIH | Rp. | 0 |
| D. GIRO DAN SETARA KAS | Rp. | 11.905.488 |
| LAINNYA | | |
| 1. Yang berasal dari --- dengan nilai Rp.11.905.488 | | |
| E. PIUTANG | Rp. | 200.000.000 |
| 1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar Rp.200.000.000 | | |
| TOTAL HARTA (II) | Rp. | 363.389.488 |
| III. HUTANG | Rp. | 0 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) | Rp. | 363.389.488 |

Berita Negara Republik Indonesia
Tanggal 15 Nopember 2016 No.91



Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis